

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara yang menganut dengan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi pasti memiliki partai politik. Partai politik merupakan suatu sarana dalam pemerintahan demokrasi yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Partai politik juga merupakan alat transportasi politik yang mana digunakan sebagai kendaraan seseorang untuk ikut dalam berdemokrasi pada waktu pemilihan umum. Dengan jalan partai politik ini nantinya rakyat dapat mencari dan menentukan dalam memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka dipemerintahan suatu negara.<sup>1</sup>

Partai politik lahir pertama kali di eropa barat yang terdiri dari dua kekuatan, yaitu kekuatan pada parlemen dari dalam bentuk sebuah kelompok-kelompok elit yang telah didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan jabatan raja, dan juga diluar parlemen yang didasarkan pada ideologi tertentu, dengan missal ideologi sosialisme dan ideologi Kristen demokrat. Menurut Budiardjo, partai politik didefinisikan bahwa partai politik ialah suatu kelompok yang mana telah terkelola dengan anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Juga terdapat tujuan dari kelompok itu yaitu untuk dapat memperoleh kekuasaan dan dapat mempertahankan kekuasaan yang nantinya sesuai dengan konstitusional atau pemerintahan.<sup>2</sup>

Ada tiga prinsip dasar yang ada dalam partai politik, yang *pertama* sebuah partai sebagai koalisi yang merupakan pembentukan dari koalisi dari banyak macam kepentingan di dalam membangun suatu kekuatan, yang *kedua* suatu partai sebagai organisasi yang merupakan kegunaanya menjadi sebuah wadah dari perjuangan yang menjadi tempat dalam memunculkan keberanian berbicara seseorang ataupun kelompok yang terdapat didalamnya, yang *ketiga* suatu partai menjadi sebuah pembuat kebijakan yang merupakan

---

<sup>1</sup> Rani Dwi Yulianti, "Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia (Studi Keberhasilan Lolos Verifikasi Faktual) Adalah," 2018, [https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept\\_cost\\_estimate\\_accepted\\_031914.pdf](https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf).

<sup>2</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

sesuatu yang akurat atau konkret apabila anggota yang dicalonkan dari partai tersebut dapat terpilih dalam pemilu maka partai itu dapat ikut dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang nantinya dibuat pada pemerintahan.<sup>3</sup>

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara sebab partai politik adalah jembatan antara pemerintah dan warga negara. Partai Politik adalah sarana atau tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan menyatakan pendapat politik. Sistem politik kita saat ini telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Berlangsungnya sistem demokrasi pada dasarnya ditentukan oleh partai politik, mulai dari proses pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, kepala daerah, hingga penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak bisa lepas dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara, sehingga bisa dikatakan baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa.<sup>4</sup>

Dari pemahaman tersebut, secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Idealnya, partai politik memiliki berbagai fungsi penting yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Hal ini merujuk pada partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat menjadi salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di suatu negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat, semakin berkualitas kondisi demokrasi. Sehingga, dengan partisipasi politik masyarakat berdampak pada penguatan partai politik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rani Dwi Yulianti, "Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia (Studi Keberhasilan Lolos Verifikasi Faktual) Adalah."

<sup>4</sup> Halimur Rosyid, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Dpd Partai Gerindra Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Dan Kota Mojokerto)," *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Gerindra* 11, no. 1 (n.d.): 32.

<sup>5</sup> Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 203.

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab, partisipasi politik masyarakat adalah hal yang penting untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan efektif. Dengan berpartisipasi dalam politik, masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan memperkuat sistem politik yang ada. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.<sup>6</sup>

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Secara konseptual pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun

---

<sup>6</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (n.d.): 330.

pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>7</sup>

Dalam pemilu yang dilakukan, rakyat sebagai pemilih disebut konstituen, dan merekalah yang dijanjikan banyak program-program untuk memajukan mereka yang dilakukan oleh peserta pemilu atau kandidat calon sebagai tujuan kampanye. Kampanye partai politik yang dilakukan telah diberi waktu untuk mereka dapat menarik masyarakat agar rakyat dapat mengetahui apa saja program yang akan dilakukan nantinya jika kandidat kampanye menjadi kandidat terpilih pada pemilu. Selanjutnya proses pemungutan suara yang dilakukan dan proses perhitungan. Pemenang pemilu nantinya ditentukan oleh peraturan yang ada yang mana sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh partai politik sebagai peserta dalam sebuah kegiatan pemilu.<sup>8</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat muslim terbanyak. Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat muslim dalam pemilu. Keberhasilan partai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim dalam pemilu sangat ditentukan oleh strategi partai dalam mensosialisasikan masyarakat, himbuan dan usulannya untuk menimbulkan pengaruh pada anggota masyarakat muslim atau juga sangat ditentukan oleh strategi partai dalam menggunakan kekuatannya sebagai partai politik. Dengan demikian peran partai dengan partisipasi politik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena jika peran partai ditingkatkan maka partisipasi politik juga akan meningkat.<sup>9</sup> Salah satu partai yang sudah menerapkan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim adalah partai Gerindra.

Partai Gerindra telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti menggelar pendidikan politik dan memberikan dukungan terhadap pencapaian ekonomi Indonesia. Partisipasi politik masyarakat pada partai politik dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan memperkuat sistem politik yang ada. Partai Gerindra telah menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung usaha kecil dan

---

<sup>7</sup> Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).

<sup>8</sup> "Sekertariat Kabinet RI," 15 desember, 2022, setkab.go.id.

<sup>9</sup> Robbi Wahyudi, "Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim pada Pemilu Legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat," 2019.

menengah. Mereka juga menekankan pentingnya standar yang jelas dan evaluasi kinerja dalam mempromosikan perubahan positif.<sup>10</sup>

Partai Gerindra memiliki kehadiran di DPRD Kabupaten Kudus dan memiliki fraksi yang aktif di sana. Partai Gerindra juga memiliki target untuk meningkatkan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kudus. Fraksi Partai Gerindra memiliki 6 anggota yang tersebar di 6 dapil di Kudus. Fraksi Partai Gerindra telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Namun, masih ada beberapa kesenjangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>11</sup>

Salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan komunikasi politik. Fraksi Partai Gerindra perlu meningkatkan kualitas komunikasi politiknya dengan masyarakat. Komunikasi politik yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partai politik dan program-programnya. Komunikasi politik yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Selain itu, permasalahan yang juga perlu diperbaiki adalah terkait dengan akses politik. Fraksi Partai Gerindra perlu meningkatkan akses masyarakat kepada partai politik. Akses politik yang mudah dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan akses politik yang mudah juga dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya kepada partai politik. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, Fraksi Partai Gerindra dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis akan meneliti mengenai “Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Islam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”.

---

<sup>10</sup> Humas DPRD. Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Atas Raperda UMKM dan BII. Akses pada <https://dprd.bandung.go.id/warta/pandangan-umum-fraksi-partai-gerindra-atas-raperda-umkm-dan-bii>. 01 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Saiful Ma sum. DPC Partai Gerindra Kudus Targetkan Penambahan Kursi DPRD 50 Persen, Gandeng Kades hingga Pengusaha, <https://jateng.tribunnews.com/2023/05/13/dpc-partai-gerindra-kudus-targetkan-penambahan-kursi-dprd-50-persen-gandeng-kades-hingga-pengusaha>. Akses pada 01 Agustus 2023.

**B. Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada strategi politik partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudas dengan pandangan dari sisi yang telah di lakukan oleh pengurus daerah partai gerindra. Fokus lokasi penelitian ini bertempat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai gerindra kudas.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada diatas maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi politik Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudas?
2. Bagaimana peran politik Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudas?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi politik Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudas?
2. Untuk mengetahui peran politik Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudas?

**E. Manfaat Penelitian**

Terkait tujuan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk memperbanyak khazanah keilmuan politik yang berkaitan dengan strategi partai politik dalam merekrut kandidat maupun kader partainya dalam fokus perekrutan kepada masyarakat kalangan masyarakat, yang khususnya kepada para mahasiswa program didik Pemikiran Politik Islam (PPI) IAIN Kudus dan pada seluruh masyarakat pembaca penelitian ini.
  - b. Agar dapat memperoleh informasi terkait pada strategi politik partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi

politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudus.

- c. Untuk digunakan sebagai bahan teori dalam menyusun penelitian selanjutnya tentang strategi rekrutmen partai politik maupun tentang partai politik saja.
2. Secara Praktis
    - a. Dapat memberikan sebuah kontribusi mengenai data dan informasi yang bisa membantu penelitian yang selanjutnya bagi peneliti-peneliti yang lain. Yang utama dengan penelitian yang terkait dengan pada strategi politik partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kudus.
    - b. Digunakan sebagai acuan kajian ilmiah oleh penulis-penulis selanjutnya sebagai insan akademis dengan melakukan penelitian.
    - c. Penelitian ini diharapkan juga dapat dan mampu untuk menyajikan sebuah referensi bagi para pegiat politik praktis sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam membangun partai yang lebih kokoh terhadap banyak halangan yang akan dihadapi dan menjadikan partai lebih baik untuk kedepannya. Dari itu para penggiat politik juga dapat lebih profesional dalam menghadapi faktor atau kendala dalam perpolitikan sehingga dapat bertindak yang matang dengan kualitas dan demokrasi yang dihadapnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan agar dapat mempermudah untuk memahami dan menelaah penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian pada bab ini secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan dari materi yang sebagian besar untuk menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang didasari oleh pembahasan secara terperinci yang

memuat tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian. Dengan penjelasan yang terdapat didalamnya yaitu tentang kajian dari Partai Politik Gerindra yang nantinya digunakan untuk acuan dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang masalah pembahasan yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian tentang strategi partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten Kudus.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan serangkaian pembahasan dari skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan dilengkapi saran-saran agar tersampaikan kepada obyek penelitian atau untuk penelitian selanjutnya.